



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 3A TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL
NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS, NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS,
DAN NOMOR SURAT/SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG MUTASI
KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENETAPAN
ANGKA PENGENAL NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2007**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**NOMOR 3A TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR
PERTIMBANGAN TEKNIS, NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS, DAN NOMOR
SURAT/SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENETAPAN
ANGKA PENGENAL NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk tertib administrasi dalam pengendalian dan penyelesaian mutasi kepegawaian dipandang perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3A Tahun 2005 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Penetapan Angka Pengenal Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3A Tahun 2005 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Penetapan Angka Pengenal Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3A TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS, NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS, DAN NOMOR SURAT/SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Mengubah Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3A Tahun 2005 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Penetapan Angka Pengenal Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 2007

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



PRAPTO HADI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR INSTANSI

No	INSTANSI	ANGKA PENGENAL NOMOR INSTANSI			
		3			
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	0	0	1	0
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	0	0	2	0
3	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	0	0	3	0
4	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	0	0	4	0
5	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0	0	5	0
6	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	0	0	6	0
7	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	0	0	8	0
8	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	0	0	9	0
9	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	0	1	0	0
10	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	0	1	1	0
11	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan	0	1	2	0
12	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	0	6	9	0
13	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	0	7	0	0
14	Departemen Dalam Negeri	0	1	4	0
15	Departemen Luar Negeri	0	1	5	0
16	Departemen Pertahanan	0	1	6	0
17	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia	0	1	7	0
18	Departemen Keuangan	0	1	8	0
19	Departemen Pertanian	0	1	9	0
20	Departemen Perindustrian	0	2	0	0
21	Departemen Perdagangan	0	7	1	0
22	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	0	2	1	0
23	Departemen Perhubungan	0	2	2	0
24	Departemen Pendidikan Nasional	0	2	3	0
25	Departemen Kesehatan	0	2	4	0
26	Departemen Agama	0	2	5	0
27	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	2	6	0
28	Departemen Sosial	0	2	7	0
29	Departemen Kehutanan	0	2	8	0
30	Departemen Kelautan dan Perikanan	0	2	9	0
31	Departemen Pekerjaan Umum	0	3	0	0
32	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	0	0	7	0
33	Departemen Komunikasi dan Informatika	0	1	3	0
34	Sekretariat Negara	0	3	1	0
35	Kejaksaan Agung	0	3	2	0
36	Badan Intelijen Negara (BIN)	0	3	3	0
37	Setjen MPR	0	3	4	0
38	Setjen Mahkamah Konstitusi	0	7	2	0
39	Setjen DPR	0	3	6	0
40	Setjen Mahkamah Agung	0	3	7	0
41	Setjen BAPEKA	0	3	8	0

1	2	3			
42	Setjen WANTANNAS	0	3	9	0
43	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	0	4	0	0
44	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	0	4	1	0
45	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	0	4	2	0
46	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)	0	4	3	0
47	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	0	4	4	0
48	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	0	4	5	0
49	Badan Pusat Statistik (BPS)	0	4	6	0
50	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	0	4	7	0
51	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	0	4	8	0
52	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)	0	4	9	0
53	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	0	5	0	0
54	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	0	5	1	0
55	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	0	5	2	0
56	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	0	5	3	0
57	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	0	5	4	0
58	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)	0	5	5	0
59	Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)	0	5	6	0
60	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	0	5	8	0
61	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	0	5	9	0
62	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	0	6	2	0
63	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)	0	6	3	0
64	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	0	7	5	0
65	Setjen Komnas HAM	0	6	4	0
66	Setjen KPK	0	6	5	0
67	Pelaksana Harian (Lakhar) BNN	0	6	6	0
68	Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	6	7	0
69	Setjen KPU	0	6	8	0
70	Setjen DPD	0	7	3	0
71	Setjen Komisi Yudisial	0	7	4	0
72	Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	5	1	0	0
72	1 Pemerintah Kab. Aceh Besar	5	1	0	1
72	2 Pemerintah Kab. Pidie	5	1	0	2
72	3 Pemerintah Kab. Aceh Utara	5	1	0	3
72	4 Pemerintah Kab. Aceh Timur	5	1	0	4
72	5 Pemerintah Kab. Aceh Selatan	5	1	0	5
72	6 Pemerintah Kab. Aceh Barat	5	1	0	6
72	7 Pemerintah Kab. Aceh Tengah	5	1	0	7
72	8 Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	5	1	0	8
72	9 Pemerintah Kab. Simeuleu	5	1	0	9
72	10 Pemerintah Kab. Bireun	5	1	1	0
72	11 Pemerintah Kab. Aceh Singkil	5	1	1	1
72	12 Pemerintah Kota Sabang	5	1	1	2
72	13 Pemerintah Kota Banda Aceh	5	1	1	3
72	14 Pemerintah Kab. Aceh Jaya	5	1	1	4
72	15 Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	5	1	1	5
72	16 Pemerintah Kab. Gayo Lues	5	1	1	6

1		2	3			
71	18	Pemerintah Kab. Nagan Raya	5	1	1	8
71	19	Pemerintah Kota Langsa	5	1	1	9
71	20	Pemerintah Kota Lhokseumawe	5	1	2	0
71	21	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	5	1	2	1
72		Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	5	2	0	0
72	1	Pemerintah Kab. Deli Serdang	5	2	0	1
72	2	Pemerintah Kab. Karo	5	2	0	2
72	3	Pemerintah Kab. Langkat	5	2	0	3
72	4	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	5	2	0	4
72	5	Pemerintah Kab. Simalungun	5	2	0	5
72	6	Pemerintah Kab. Labuhan Batu	5	2	0	6
72	7	Pemerintah Kab. Dairi	5	2	0	7
72	8	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	5	2	0	8
72	9	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	5	2	0	9
72	10	Pemerintah Kab. Asahan	5	2	1	0
72	11	Pemerintah Kab. Nias	5	2	1	1
72	12	Pemerintah Kab. Toba Samosir	5	2	1	2
72	13	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	5	2	1	3
72	14	Pemerintah Kota Medan	5	2	1	4
72	15	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	5	2	1	5
72	16	Pemerintah Kota Binjai	5	2	1	6
72	17	Pemerintah Kota Pematang Siantar	5	2	1	7
72	18	Pemerintah Kota Tanjung Balai	5	2	1	8
72	19	Pemerintah Kota Sibolga	5	2	1	9
72	20	Pemerintah Kab. Nias Selatan	5	2	2	0
72	21	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	5	2	2	1
72	22	Pemerintah Kab. Pakpak Barat	5	2	2	2
72	23	Pemerintah Kota Padang Sidempuan	5	2	2	3
72	24	Pemerintah Kabupaten Samosir	5	2	2	4
72	25	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	5	2	2	5
73		Pemerintah Provinsi Riau	5	3	0	0
73	1	Pemerintah Kab. Kampar	5	3	0	1
73	2	Pemerintah Kab. Bengkalis	5	3	0	2
73	3	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	5	3	0	4
73	4	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	5	3	0	5
73	5	Pemerintah Kab. Pelalawan	5	3	0	6
73	6	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	5	3	0	7
73	7	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	5	3	0	8
73	8	Pemerintah Kab. Siak	5	3	0	9
73	9	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	5	3	1	2
73	10	Pemerintah Kota Pekanbaru	5	3	1	3
73	11	Pemerintah Kota Dumai	5	3	1	5
74		Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	8	3	0	0
74	1	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau	8	3	0	1
74	2	Pemerintah Kabupaten Karimun	8	3	0	2
74	3	Pemerintah Kabupaten Natuna	8	3	0	3
74	4	Pemerintah Kabupaten Lingga	8	3	0	4
74	5	Pemerintah Kota Batam	8	3	0	5
74	6	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	8	3	0	6
75		Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	5	4	0	0
75	1	Pemerintah Kab. Agam	5	4	0	1
75	2	Pemerintah Kab. Pasaman	5	4	0	2

1		2	3			
75	3	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	5	4	0	3
75	4	Pemerintah Kab. Solok	5	4	0	4
75	5	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	5	4	0	5
75	6	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	5	4	0	6
75	7	Pemerintah Kab. Tanah Datar	5	4	0	7
75	8	Pemerintah Kab. Sawah Lunto Sijunjung	5	4	0	8
75	9	Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	5	4	0	9
75	10	Pemerintah Kota Bukit Tinggi	5	4	1	0
75	11	Pemerintah Kota Padang Panjang	5	4	1	1
75	12	Pemerintah Kota Sawah Lunto	5	4	1	2
75	13	Pemerintah Kota Solok	5	4	1	3
75	14	Pemerintah Kota Padang	5	4	1	4
75	15	Pemerintah Kota Payakumbuh	5	4	1	5
75	16	Pemerintah Kota Pariaman	5	4	1	6
75	17	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	5	4	1	7
75	18	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	5	4	1	8
75	19	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	5	4	1	9
76		Pemerintah Provinsi Jambi	5	5	0	0
76	1	Pemerintah Kab. Batang Hari	5	5	0	1
76	2	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	5	5	0	2
76	3	Pemerintah Kab. Bungo	5	5	0	3
76	4	Pemerintah Kab. Merangin	5	5	0	4
76	5	Pemerintah Kab. Kerinci	5	5	0	5
76	6	Pemerintah Kab. Sarolangun	5	5	0	6
76	7	Pemerintah Kab. Tebo	5	5	0	7
76	8	Pemerintah Kab. Muara Jambi	5	5	0	8
76	9	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	5	5	0	9
76	10	Pemerintah Kota Jambi	5	5	1	0
77		Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	5	6	0	0
77	1	Pemerintah Kab. Musi Banyu Asin	5	6	0	1
77	2	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	5	6	0	2
77	3	Pemerintah Kab. Muara Enim	5	6	0	3
77	4	Pemerintah Kab. Lahat	5	6	0	4
77	5	Pemerintah Kab. Musi Rawas	5	6	0	5
77	6	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	5	6	0	6
77	7	Pemerintah Kota Palembang	5	6	0	7
77	8	Pemerintah Kab. Banyu Asin	5	6	0	8
77	9	Pemerintah Kota Prabumulih	5	6	0	9
77	10	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	5	6	1	0
77	11	Pemerintah Kota Pagar Alam	5	6	1	1
77	12	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	5	6	1	2
77	13	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	5	6	1	3
77	14	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	5	6	1	4
78		Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	5	7	0	0
78	1	Pemerintah Kab. Bangka	5	7	0	1
78	2	Pemerintah Kab. Belitung	5	7	0	2
78	3	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	5	7	0	3
78	4	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	5	7	0	4
78	5	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	5	7	0	5
78	6	Pemerintah Kab. Bangka Barat	5	7	0	6
78	7	Pemerintah Kab. Belitung Timur	5	7	0	7
79		Pemerintah Provinsi Bengkulu	5	8	0	0

1		2	3			
79	1	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	5	8	0	1
79	2	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	5	8	0	2
79	3	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	5	8	0	3
79	4	Pemerintah Kota Bengkulu	5	8	0	4
79	5	Pemerintah Kab. Mukomuko	5	8	0	5
79	6	Pemerintah Kab. Seluma	5	8	0	6
79	7	Pemerintah Kab. Kaur	5	8	0	7
79	8	Pemerintah Kab. Lebong	5	8	0	8
79	9	Pemerintah Kab. Kepahiang	5	8	0	9
80		Pemerintah Provinsi Lampung	5	9	0	0
80	1	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	5	9	0	1
80	2	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	5	9	0	2
80	3	Pemerintah Kab. Lampung Utara	5	9	0	3
80	4	Pemerintah Kab. Lampung Barat	5	9	0	4
80	5	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	5	9	0	5
80	6	Pemerintah Kab. Tanggamus	5	9	0	6
80	7	Pemerintah Kab. Way Kanan	5	9	0	7
80	8	Pemerintah Kab. Lampung Timur	5	9	0	8
80	9	Pemerintah Kota Metro	5	9	0	9
80	10	Pemerintah Kota Bandar Lampung	5	9	1	0
81		Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	6	0	0	0
82		Pemerintah Provinsi Jawa Barat	6	1	0	0
82	1	Pemerintah Kab. Bogor	6	1	0	1
82	2	Pemerintah Kab. Sukabumi	6	1	0	2
82	3	Pemerintah Kab. Cianjur	6	1	0	3
82	4	Pemerintah Kab. Bekasi	6	1	0	4
82	5	Pemerintah Kab. Karawang	6	1	0	5
82	6	Pemerintah Kab. Purwakarta	6	1	0	6
82	7	Pemerintah Kab. Subang	6	1	0	7
82	8	Pemerintah Kab. Bandung	6	1	0	8
82	9	Pemerintah Kab. Sumedang	6	1	0	9
82	10	Pemerintah Kab. Garut	6	1	1	0
82	11	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	6	1	1	1
82	12	Pemerintah Kab. Ciamis	6	1	1	2
82	13	Pemerintah Kab. Cirebon	6	1	1	3
82	14	Pemerintah Kab. Kuningan	6	1	1	4
82	15	Pemerintah Kab. Indramayu	6	1	1	5
82	16	Pemerintah Kab. Majalengka	6	1	1	6
82	17	Pemerintah Kota Bandung	6	1	1	7
82	18	Pemerintah Kota Bogor	6	1	1	8
82	19	Pemerintah Kota Sukabumi	6	1	1	9
82	20	Pemerintah Kota Cirebon	6	1	2	0
82	21	Pemerintah Kota Bekasi	6	1	2	1
82	22	Pemerintah Kota Depok	6	1	2	2
82	23	Pemerintah Kota Cimahi	6	1	2	3
82	24	Pemerintah Kota Tasikmalaya	6	1	2	4
82	25	Pemerintah Kota Banjar	6	1	2	5
83		Pemerintah Provinsi Banten	6	2	0	0
83	1	Pemerintah Kab. Serang	6	2	0	1
83	2	Pemerintah Kab. Pandeglang	6	2	0	2
83	3	Pemerintah Kab. Lebak	6	2	0	3
83	4	Pemerintah Kab. Tangerang	6	2	0	4

1		2		3			
83	5	Pemerintah Kota Tangerang	6	2	0	5	
83	6	Pemerintah Kota Cilegon	6	2	0	6	
84		Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	6	3	0	0	
84	1	Pemerintah Kab. Bantul	6	3	0	1	
84	2	Pemerintah Kab. Sleman	6	3	0	2	
84	3	Pemerintah Kab. Gunung Kidul	6	3	0	3	
84	4	Pemerintah Kab. Kulon Progo	6	3	0	4	
84	5	Pemerintah Kota Yogyakarta	6	3	0	5	
85		Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	6	4	0	0	
85	1	Pemerintah Kab. Semarang	6	4	0	1	
85	2	Pemerintah Kab. Kendal	6	4	0	2	
85	3	Pemerintah Kab. Demak	6	4	0	3	
85	4	Pemerintah Kab. Grobogan	6	4	0	4	
85	5	Pemerintah Kab. Pekalongan	6	4	0	5	
85	6	Pemerintah Kab. Batang	6	4	0	6	
85	7	Pemerintah Kab. Tegal	6	4	0	7	
85	8	Pemerintah Kab. Brebes	6	4	0	8	
85	9	Pemerintah Kab. Pati	6	4	0	9	
85	10	Pemerintah Kab. Kudus	6	4	1	0	
85	11	Pemerintah Kab. Pemalang	6	4	1	1	
85	12	Pemerintah Kab. Jepara	6	4	1	2	
85	13	Pemerintah Kab. Rembang	6	4	1	3	
85	14	Pemerintah Kab. Blora	6	4	1	4	
85	15	Pemerintah Kab. Banyumas	6	4	1	5	
85	16	Pemerintah Kab. Cilacap	6	4	1	6	
85	17	Pemerintah Kab. Purbalingga	6	4	1	7	
85	18	Pemerintah Kab. Banjarnegara	6	4	1	8	
85	19	Pemerintah Kab. Magelang	6	4	1	9	
85	20	Pemerintah Kab. Temanggung	6	4	2	0	
85	21	Pemerintah Kab. Wonosobo	6	4	2	1	
85	22	Pemerintah Kab. Purworejo	6	4	2	2	
85	23	Pemerintah Kab. Kebumen	6	4	2	3	
85	24	Pemerintah Kab. Klaten	6	4	2	4	
85	25	Pemerintah Kab. Boyolali	6	4	2	5	
85	26	Pemerintah Kab. Sragen	6	4	2	6	
85	27	Pemerintah Kab. Sukoharjo	6	4	2	7	
85	28	Pemerintah Kab. Karanganyar	6	4	2	8	
85	29	Pemerintah Kab. Wonogiri	6	4	2	9	
85	30	Pemerintah Kota Semarang	6	4	3	0	
85	31	Pemerintah Kota Salatiga	6	4	3	1	
85	32	Pemerintah Kota Pekalongan	6	4	3	2	
85	33	Pemerintah Kota Tegal	6	4	3	3	
85	34	Pemerintah Kota Magelang	6	4	3	4	
85	35	Pemerintah Kota Surakarta	6	4	3	5	
86		Pemerintah Provinsi Jawa Timur	6	5	0	0	
86	1	Pemerintah Kab. Gresik	6	5	0	1	
86	2	Pemerintah Kab. Mojokerto	6	5	0	2	
86	3	Pemerintah Kab. Sidoarjo	6	5	0	3	
86	4	Pemerintah Kab. Jombang	6	5	0	4	
86	5	Pemerintah Kab. Sampang	6	5	0	5	
86	6	Pemerintah Kab. Pamekasan	6	5	0	6	
86	7	Pemerintah Kab. Sumenep	6	5	0	7	

1		2	3			
86	8	Pemerintah Kab. Bangkalan	6	5	0	8
86	9	Pemerintah Kab. Bondowoso	6	5	0	9
86	10	Pemerintah Kab. Situbondo	6	5	1	0
86	11	Pemerintah Kab. Banyuwangi	6	5	1	1
86	12	Pemerintah Kab. Jember	6	5	1	2
86	13	Pemerintah Kab. Malang	6	5	1	3
86	14	Pemerintah Kab. Pasuruan	6	5	1	4
86	15	Pemerintah Kab. Probolinggo	6	5	1	5
86	16	Pemerintah Kab. Lumajang	6	5	1	6
86	17	Pemerintah Kab. Kediri	6	5	1	7
86	18	Pemerintah Kab. Tulung Agung	6	5	1	8
86	19	Pemerintah Kab. Nganjuk	6	5	1	9
86	20	Pemerintah Kab. Trenggalek	6	5	2	0
86	21	Pemerintah Kab. Blitar	6	5	2	1
86	22	Pemerintah Kab. Madiun	6	5	2	2
86	23	Pemerintah Kab. Ngawi	6	5	2	3
86	24	Pemerintah Kab. Magetan	6	5	2	4
86	25	Pemerintah Kab. Ponorogo	6	5	2	5
86	26	Pemerintah Kab. Pacitan	6	5	2	6
86	27	Pemerintah Kab. Bojonegoro	6	5	2	7
86	28	Pemerintah Kab. Tuban	6	5	2	8
86	29	Pemerintah Kab. Lamongan	6	5	2	9
86	30	Pemerintah Kota Surabaya	6	5	3	0
86	31	Pemerintah Kota Mojokerto	6	5	3	1
86	32	Pemerintah Kota Malang	6	5	3	2
86	33	Pemerintah Kota Pasuruan	6	5	3	3
86	34	Pemerintah Kota Probolinggo	6	5	3	4
86	35	Pemerintah Kota Blitar	6	5	3	5
86	36	Pemerintah Kota Kediri	6	5	3	6
86	37	Pemerintah Kota Madiun	6	5	3	7
86	38	Pemerintah Kota Batu	6	5	3	8
87		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	6	6	0	0
87	1	Pemerintah Kab. Sambas	6	6	0	1
87	2	Pemerintah Kab. Sanggau	6	6	0	2
87	3	Pemerintah Kab. Sintang	6	6	0	3
87	4	Pemerintah Kab. Pontianak	6	6	0	4
87	5	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	6	6	0	5
87	6	Pemerintah Kab. Ketapang	6	6	0	6
87	7	Pemerintah Kab. Bengkayang	6	6	0	7
87	8	Pemerintah Kab. Landak	6	6	0	8
87	9	Pemerintah Kota Pontianak	6	6	0	9
87	10	Pemerintah Kota Singkawang	6	6	1	0
87	11	Pemerintah Kab. Melawi	6	6	1	1
87	12	Pemerintah Kab. Sekadau	6	6	1	2
88		Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	6	7	0	0
88	1	Pemerintah Kab. Kapuas	6	7	0	1
88	2	Pemerintah Kab. Barito Utara	6	7	0	2
88	3	Pemerintah Kab. Barito Selatan	6	7	0	3
88	4	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	6	7	0	4
88	5	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	6	7	0	5
88	6	Pemerintah Kota Palangkaraya	6	7	0	6
88	7	Pemerintah Kab. Barito Timur	6	7	0	7

1		2		3			
88	8	Pemerintah Kab. Gunung Mas	6	7	0	8	
88	9	Pemerintah Kab. Katingan	6	7	0	9	
88	10	Pemerintah Kab. Lamandau	6	7	1	0	
88	11	Pemerintah Kab. Murung Raya	6	7	1	1	
88	12	Pemerintah Kab. Seruyan	6	7	1	2	
88	13	Pemerintah Kab. Sukamara	6	7	1	3	
88	14	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	6	7	1	4	
89		Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	6	8	0	0	
89	1	Pemerintah Kab. Banjar	6	8	0	1	
89	2	Pemerintah Kab. Tanah Laut	6	8	0	2	
89	3	Pemerintah Kab. Tapin	6	8	0	3	
89	4	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	6	8	0	4	
89	5	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	6	8	0	5	
89	6	Pemerintah Kab. Barito Kuala	6	8	0	6	
89	7	Pemerintah Kab. Tabalong	6	8	0	7	
89	8	Pemerintah Kab. Kota Baru	6	8	0	8	
89	9	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	6	8	0	9	
89	10	Pemerintah Kota Banjarmasin	6	8	1	0	
89	11	Pemerintah Kota Banjar Baru	6	8	1	1	
89	12	Pemerintah Kab. Balangan	6	8	1	2	
89	13	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	6	8	1	3	
90		Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	6	9	0	0	
90	1	Pemerintah Kab. Kutai Kertanegara	6	9	0	1	
90	2	Pemerintah Kab. Pasir	6	9	0	2	
90	3	Pemerintah Kab. Bulungan	6	9	0	3	
90	4	Pemerintah Kab. Berau	6	9	0	4	
90	5	Pemerintah Kab. Malinau	6	9	0	5	
90	6	Pemerintah Kab. Nunukan	6	9	0	6	
90	7	Pemerintah Kab. Kutai Barat	6	9	0	7	
90	8	Pemerintah Kab. Kutai Timur	6	9	0	8	
90	9	Pemerintah Kota Samarinda	6	9	0	9	
90	10	Pemerintah Kota Balikpapan	6	9	1	0	
90	11	Pemerintah Kota Bontang	6	9	1	1	
90	12	Pemerintah Kota Tarakan	6	9	1	2	
90	13	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	6	9	1	3	
91		Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	7	0	0	0	
91	1	Pemerintah Kab. Minahasa	7	0	0	1	
91	2	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	7	0	0	2	
91	3	Pemerintah Kab. Sangihe	7	0	0	3	
91	4	Pemerintah Kota Manado	7	0	0	4	
91	5	Pemerintah Kota Bitung	7	0	0	5	
91	6	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	7	0	0	6	
91	7	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	7	0	0	7	
91	8	Pemerintah Kota Tomohon	7	0	0	8	
91	9	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	7	0	0	9	
92		Pemerintah Provinsi Gorontalo	7	1	0	0	
92	1	Pemerintah Kab. Gorontalo	7	1	0	1	
92	2	Pemerintah Kab. Boalemo	7	1	0	2	
92	3	Pemerintah Kota Gorontalo	7	1	0	3	
92	4	Pemerintah Kab. Pohuwato	7	1	0	4	
92	5	Pemerintah Kab. Bone Bolango	7	1	0	5	

1		2	3			
93		Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah	7	2	0	0
93	1	Pemerintah Kab. Poso	7	2	0	1
93	2	Pemerintah Kab. Donggala	7	2	0	2
93	3	Pemerintah Kab. Toli - Toli	7	2	0	3
93	4	Pemerintah Kab. Banggai	7	2	0	4
93	5	Pemerintah Kab. Buol	7	2	0	5
93	6	Pemerintah Kab. Morowali	7	2	0	6
93	7	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	7	2	0	7
93	8	Pemerintah Kota Palu	7	2	0	8
93	9	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	7	2	0	9
93	10	Pemerintah Kab. Tojo Una -Una	7	2	1	0
94		Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	7	3	0	0
94	1	Pemerintah Kab. Pinrang	7	3	0	1
94	2	Pemerintah Kab. Gowa	7	3	0	2
94	3	Pemerintah Kab. Wajo	7	3	0	3
94	4	Pemerintah Kab. Bone	7	3	0	5
94	5	Pemerintah Kab. Tanah Toraja	7	3	0	6
94	6	Pemerintah Kab. Maros	7	3	0	7
94	7	Pemerintah Kab. Luwu	7	3	0	9
94	8	Pemerintah Kab. Sinjai	7	3	1	0
94	9	Pemerintah Kab. Bulukumba	7	3	1	1
94	10	Pemerintah Kab. Bantaeng	7	3	1	2
94	11	Pemerintah Kab. Jeneponto	7	3	1	3
94	12	Pemerintah Kab. Selayar	7	3	1	4
94	13	Pemerintah Kab. Takalar	7	3	1	5
94	14	Pemerintah Kab. Barru	7	3	1	6
94	15	Pemerintah Kab. Sidrap	7	3	1	7
94	16	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	7	3	1	8
94	17	Pemerintah Kab. Soppeng	7	3	1	9
94	18	Pemerintah Kab. Enrekang	7	3	2	1
94	19	Pemerintah Kab. Luwu Utara	7	3	2	2
94	20	Pemerintah Kota Makassar	7	3	2	3
94	21	Pemerintah Kota Pare - Pare	7	3	2	4
94	22	Pemerintah Kab. Luwu Timur	7	3	2	6
94	23	Pemerintah Kota Palopo	7	3	2	8
95		Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	7	4	0	0
95	1	Pemerintah Kab. Konawe	7	4	0	1
95	2	Pemerintah Kab. Buton	7	4	0	2
95	3	Pemerintah Kab. Muna	7	4	0	3
95	4	Pemerintah Kab. Kolaka	7	4	0	4
95	5	Pemerintah Kota Kendari	7	4	0	5
95	6	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	7	4	0	6
95	7	Pemerintah Kota Bau – Bau	7	4	0	7
95	8	Pemerintah Kab. Bombana	7	4	0	8
95	9	Pemerintah Kab. Wakatobi	7	4	0	9
95	10	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	7	4	1	0
96		Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	8	4	0	0
96	1	Pemerintah Kabupaten Mamuju	8	4	0	1
96	2	Pemerintah Kabupaten Majene	8	4	0	2
96	3	Pemerintah Kabupaten Polewali	8	4	0	3
96	4	Pemerintah Kabupaten Mamasa	8	4	0	4
96	5	Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara	8	4	0	5

1		2		3			
97		Pemerintah Provinsi Bali		7	5	0	0
97	1	Pemerintah Kab. Buleleng		7	5	0	1
97	2	Pemerintah Kab. Jembrana		7	5	0	2
97	3	Pemerintah Kab. Klungkung		7	5	0	3
97	4	Pemerintah Kab. Gianyar		7	5	0	4
97	5	Pemerintah Kab. Karang Asem		7	5	0	5
97	6	Pemerintah Kab. Bangli		7	5	0	6
97	7	Pemerintah Kab. Badung		7	5	0	7
97	8	Pemerintah Kab. Tabanan		7	5	0	8
97	9	Pemerintah Kota Denpasar		7	5	0	9
98		Pemerintah Provinsi NTB		7	6	0	0
98	1	Pemerintah Kab. Lombok Barat		7	6	0	1
98	2	Pemerintah Kab. Lombok Tengah		7	6	0	2
98	3	Pemerintah Kab. Lombok Timur		7	6	0	3
98	4	Pemerintah Kab. Bima		7	6	0	4
98	5	Pemerintah Kab. Sumbawa		7	6	0	5
98	6	Pemerintah Kab. Dompu		7	6	0	6
98	7	Pemerintah Kab. Mataram		7	6	0	7
98	8	Pemerintah Kota Bima		7	6	0	8
98	9	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat		7	6	0	9
99		Pemerintah Provinsi NTT		7	7	0	0
99	1	Pemerintah Kab. Kupang		7	7	0	1
99	2	Pemerintah Kab. Belu		7	7	0	2
99	3	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara		7	7	0	3
99	4	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan		7	7	0	4
99	5	Pemerintah Kab. Alor		7	7	0	5
99	6	Pemerintah Kab. Sikka		7	7	0	6
99	7	Pemerintah Kab. Flores Timur		7	7	0	7
99	8	Pemerintah Kab. Ende		7	7	0	8
99	9	Pemerintah Kab. Ngada		7	7	0	9
99	10	Pemerintah Kab. Manggarai		7	7	1	0
99	11	Pemerintah Kab. Sumba Timur		7	7	1	1
99	12	Pemerintah Kab. Sumba Barat		7	7	1	2
99	13	Pemerintah Kab. Lembata		7	7	1	3
99	14	Pemerintah Kota Kupang		7	7	1	4
99	15	Pemerintah Kab. Rote Ndao		7	7	1	5
99	16	Pemerintah Kab. Manggarai Barat		7	7	1	6
100		Pemerintah Provinsi Maluku		7	8	0	0
100	1	Pemerintah Kab. Maluku Tengah		7	8	0	1
100	2	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara		7	8	0	2
100	3	Pemerintah Kab. Buru		7	8	0	3
100	4	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat		7	8	0	4
100	5	Pemerintah Kota Ambon		7	8	0	5
100	6	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur		7	8	0	6
100	7	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat		7	8	0	7
100	8	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru		7	8	0	8
101		Pemerintah Provinsi Maluku Utara		7	9	0	0
101	1	Pemerintah Kab. Halmahera Barat		7	9	0	1
101	2	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah		7	9	0	2
101	3	Pemerintah Kota Ternate		7	9	0	3
101	4	Pemerintah Kab. Halmahera Utara		7	9	0	4

1		2	3			
102	5	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	7	9	0	5
102	6	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	7	9	0	6
102	7	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	7	9	0	7
102	8	Pemerintah Kota Tidore	7	9	0	8
103		Pemerintah Provinsi Papua (Irian Jaya Timur)	8	0	0	0
103	1	Pemerintah Kab. Jaya Pura	8	0	0	1
103	2	Pemerintah Kab. Merauke	8	0	0	2
103	3	Pemerintah Kab. Jayawijaya	8	0	0	3
103	4	Pemerintah Kota Jayapura	8	0	0	4
103	5	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	8	0	0	5
103	6	Pemerintah Kab. Sarmi	8	0	0	6
103	7	Pemerintah Kab. Keerom	8	0	0	7
103	8	Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang	8	0	0	8
103	9	Pemerintah Kab. Yahukimo	8	0	0	9
103	10	Pemerintah Kab. Tolikara	8	0	1	0
103	11	Pemerintah Kab. Boven Digoel	8	0	1	1
103	12	Pemerintah Kab. Mappi	8	0	1	2
103	13	Pemerintah Kab. Asmat	8	0	1	3
104		Pemerintah Provinsi Irian Jaya Tengah	8	1	0	0
104	1	Pemerintah Kab. Biak Numfor	8	1	0	1
104	2	Pemerintah Kab. Yapen Waropen	8	1	0	2
104	3	Pemerintah Kab. Waropen	8	1	0	3
104	4	Pemerintah Kab. Nabire	8	1	0	4
104	5	Pemerintah Kab. Paniai	8	1	0	5
104	6	Pemerintah Kab. Mimika	8	1	0	6
104	7	Pemerintah Kab. Supiori	8	1	0	7
105		Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat	8	2	0	0
105	1	Pemerintah Kab. Sorong	8	2	0	1
105	2	Pemerintah Kab. Sorong Selatan	8	2	0	2
105	3	Pemerintah Kab. Raja Ampat	8	2	0	3
105	4	Pemerintah Kab. Manokwari	8	2	0	4
105	5	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni	8	2	0	5
105	6	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	8	2	0	6
105	7	Pemerintah Kab. Fak – Fak	8	2	0	7
105	8	Pemerintah Kab. Kaimana	8	2	0	8
105	9	Pemerintah Kota Sorong	8	2	0	9

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


PRAPTO HADI

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PENGENAL
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	PENGENAL
1	2	3
1	Kantor Regional I BKN di Yogyakarta	B
2	Kantor Regional II BKN di Surabaya	C
3	Kantor Regional III BKN di Bandung	D
4	Kantor Regional IV BKN di Makassar	E
5	Kantor Regional V BKN di Jakarta	F
6	Kantor Regional VI BKN di Medan	G
7	Kantor Regional VII BKN di Palembang	H
8	Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru	I
9	Kantor Regional IX BKN di Jayapura	J
10	Kantor Regional X BKN di Denpasar	K
11	Kantor Regional XI BKN di Manado	L
12	Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru	M

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


PRAPTO HADI

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 6 Pebruari 2007

DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR IDENTITAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL (NIP)

NO	INSTANSI	ANGKA PENGENAL NIP
1	2	3
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	830000000
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	840000000
3	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	850000000
4	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	860000000
5	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	M10000000
6	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	870000000
7	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	890000000
8	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	910000000
9	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	930000000
10	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	880000000
11	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan	820000000
12	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	M20000000
13	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	M30000000
14	Departemen Dalam Negeri	010000000
15	Departemen Luar Negeri	020000000
16	Departemen Pertahanan	030000000
17	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia	040000000
18	Departemen Keuangan	060000000
19	Departemen Perdagangan	070000000
20	Departemen Pertanian	080000000
21	Departemen Perindustrian	090000000
22	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	100000000
23	Departemen Pekerjaan Umum	110000000
24	Departemen Perhubungan	120000000
25	Departemen Pendidikan Nasional	130000000
26	Departemen Kesehatan	140000000
27	Departemen Agama	150000000
28	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	160000000
29	Departemen Sosial	170000000
30	Departemen Kehutanan	710000000
31	Departemen Kelautan dan Perikanan	950000000
32	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	720000000
33	Departemen Komunikasi dan Informatika	960000000

1	2	3
34	Sekretariat Negara	180000000
35	Kejaksaan Agung	230000000
36	Badan Intelijen Negara (BIN)	310000000
37	Setjen MPR	190000000
38	Setjen Mahkamah Konstitusi	J30000000
39	Setjen DPR	210000000
40	Setjen Mahkamah Agung	220000000
41	Setjen BAPEKA	240000000
42	Setjen WANTANNAS	660000000
43	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	250000000
44	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	260000000
45	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	270000000
46	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)	300000000
47	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	320000000
48	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	330000000
49	Badan Pusat Statistik (BPS)	340000000
50	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	350000000
51	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	360000000
52	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)	370000000
53	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	380000000
54	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	650000000
55	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	680000000
56	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	740000000
57	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	750000000
58	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)	760000000
59	Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)	B10000000
60	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	790000000
61	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	800000000
62	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	B20000000
63	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)	L20000000
64	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	B30000000
65	Setjen Komnas HAM	J10000000
66	Setjen KPK	J20000000
67	Pelaksana Harian (Lakhar) BNN	920000000
68	Kepolisian Negara Republik Indonesia	K10000000
69	Setjen KPU	J40000000
70	Setjen DPD	J50000000
71	Setjen Komisi Yudisial	J60000000
72	Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	390000000
73	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	400000000
74	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	410000000
75	Pemerintah Provinsi Riau	420000000

1	2	3
76	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	P20000000
77	Pemerintah Provinsi Jambi	430000000
78	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	440000000
79	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	P10000000
80	Pemerintah Provinsi Bengkulu	450000000
81	Pemerintah Provinsi Lampung	460000000
82	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	470000000
83	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	480000000
84	Pemerintah Provinsi Banten	900000000
85	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	490000000
86	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	500000000
87	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	510000000
88	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	520000000
89	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	530000000
90	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	540000000
91	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	550000000
92	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	560000000
93	Pemerintah Provinsi Gorontalo	940000000
94	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	570000000
95	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	580000000
96	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	P30000000
97	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	590000000
98	Pemerintah Provinsi Bali	600000000
99	Pemerintah Provinsi NTB	610000000
100	Pemerintah Provinsi NTT	620000000
101	Pemerintah Provinsi Maluku	630000000
102	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	970000000
103	Pemerintah Provinsi Papua (Irian Jaya Timur)	640000000
104	Pemerintah Provinsi Irian Jaya Tengah	980000000
105	Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat	990000000

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


PRAPTO HADI